

**STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI DESA
TULUNGREJO KECAMATAN BUMIAJI
PEMERINTAH KOTA BATU**

SKRIPSI

ADMINISTRASI PUBLIK



Oleh :

CLINTON KALEDI WAWO

2015210134

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TRIBHUWANA TUNGGADDEWI
MALANG**

2024

RINGKASAN

Strategi untuk mendukung kelompok tani di daerah Tulungrejo harus dilaksanakan bersama-sama dengan pemerintah daerah dan Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, data untuk penelitian ini dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan pencatatan. Sekretaris desa, ketua kelompok tani, sekretaris kelompok tani, dan anggota kelompok tani lainnya berperan sebagai informan penelitian. Temuan penelitian ini dibandingkan dengan pendekatan pemerintah desa dalam memberdayakan kelompok tani dalam berbagai konteks, khususnya dengan menumbuhkan lingkungan yang mendukung potensi kolektif. Kedua, peningkatan kemungkinan tercapainya kemandirian ekonomi guna meningkatkan kapabilitas. Ketiga, pelestarian kepentingan dengan menciptakan kerangka perlindungan bagi masyarakat yang baru muncul. Kendala dalam strategi pemberdayaan kelompok tani antara lain kesadaran partisipasi, motivasi diri, dan pola pikir kelompok tani. Namun, dukungan sarana dan prasarana penyuluhan memungkinkan mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan.

Kata kunci: Pemerintah desa, Pemberdayaan, Kelompok Tani.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Karena pertanian merupakan sumber pendapatan utama bagi sebagian besar penduduk pedesaan, masyarakat pedesaan sangat penting bagi industri pertanian. Industri pertanian di Indonesia secara historis telah menyerap sebagian besar tenaga kerja. Karena sebagian besar keluarga pedesaan masih mengandalkan pertanian sebagai sumber pendapatan utama mereka, masih banyak sumber daya manusia yang siap dan mampu bekerja di bidang yang sedang berkembang ini. 37,86 juta penduduk Indonesia, atau 30,96% dari 124,54 juta penduduk negara ini, bekerja di sektor pertanian pada tahun 2017, menurut Suhariyanto (2017:4). Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, termasuk beras, jagung, umbi-umbian, dan rempah-rempah. Karena keadaan alamiah ini, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Daerah kepulauan yang subur dapat memberikan alternatif pertanian tambahan bagi penduduknya, yang memungkinkan industri pertanian untuk mendanai kegiatan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dan memengaruhi perolehan uang. Cara ini harus mengutamakan masyarakat (Sumodiningrat, 2016:20).

Memotivasi, menyiapkan, dan menopang pemberdayaan masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan, pemberdayaan mengacu pada kapasitas masyarakat untuk mencari sendiri, menghasilkan sesuatu, dan menuai hasilnya. Dalam konteks ekonomi, menikmati setara dengan menghasilkan (supply) dan mengonsumsi

(demand) (Adisasmita, 2013: 127). Dengan mewujudkan pemerintahan secara lebih realistis, pemerintah daerah akan memiliki kekuatan yang lebih besar untuk meningkatkan layanan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh. Karena desa merupakan komponen pemerintahan kabupaten/kota yang bertanggung jawab langsung kepada masyarakat, maka pemerintahan desa perlu lebih dekat dengan masyarakat. Semua jenjang pemerintahan, khususnya pemerintahan desa, berupaya menciptakan struktur kelembagaan dan tata kerja yang dapat mewujudkan pemerintahan yang responsif terhadap perkembangan dan perubahan, berangkat dari tujuan untuk meningkatkan sistem pemerintahan desa (Sumodiningrat, 2016: 86).

Agar suatu bangsa dapat maju dalam periode pertumbuhan yang pesat ini, penciptaan strategi pembangunan berkelanjutan menjadi sangat penting. Perluasan ini dapat berupa sumber daya tambahan atau kemajuan nyata untuk memberdayakan masyarakat. Sasaran pembangunan mencakup keterlibatan dalam penegakan hukum internasional, pendidikan nasional, kemajuan kesejahteraan umum, dan perlindungan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dan tanah airnya. Pembangunan nasional merupakan salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut, sebagaimana tercantum dalam RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang). Untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan suatu negara, diperlukan program pembangunan nasional. Kemajuan intelektual maupun fisik dapat berupa pembangunan di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, dan keamanan (Adi, 2008:19).

Perekonomian Indonesia bertumpu pada sektor pertanian karena sektor ini sangat penting bagi terwujudnya kemajuan ekonomi negara. Karena pertanian memainkan peran utama dalam pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah memberikan perhatian khusus terhadapnya. Mayoritas masyarakat yang tinggal di negara berkembang mengandalkan sektor pertanian untuk menyediakan lapangan pekerjaan dan kebutuhan pokok seperti pangan, sandang, dan papan. Pentingnya sektor pertanian bagi perekonomian suatu negara ditunjukkan dengan besarnya sumbangan sektor ini terhadap PDB. Suatu negara dikatakan sebagai negara industri jika sektor pertaniannya hanya memberikan sumbangan yang sangat kecil terhadap PDB-nya; sebaliknya, jika sumbangannya besar, maka negara tersebut disebut sebagai negara agraris (Tati, 2012:23). Sebagian besar peningkatan perekonomian nasional berasal dari pembangunan ekonomi berbasis pertanian.

Sebagian besar buruh tani Indonesia menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Meningkatkan gizi keluarga dan ketahanan pangan, memperluas kesempatan kerja dan usaha, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, serta menurunkan angka kemiskinan di pedesaan merupakan tujuan pembangunan pertanian. Mayoritas masyarakat pedesaan menggantungkan hidup pada hasil panen. Pembentukan organisasi petani merupakan salah satu cara untuk membantu petani memperoleh pendapatan yang cukup sekaligus meningkatkan hasil panen padi. Klub-klub ini menyediakan tempat bagi para petani untuk berdiskusi dan mengatasi berbagai masalah yang mereka hadapi. Para petani yang mendapatkan pelatihan khusus juga dapat belajar cara mengatasi kendala dengan dukungan

pemerintah. Para petani belum memanfaatkan secara maksimal sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM) yang tersedia (Tati, 2012:28).

Hubungan mereka akan memberi petani akses yang lebih besar ke sumber daya manusia, yang akan memfasilitasi perolehan informasi baru, yang akan sangat membantu petani. Kemajuan pertanian bergantung pada pemberdayaan masyarakat petani untuk mengalami peningkatan pembangunan fisik. Setiap program dan inisiatif yang meningkatkan kapasitas petani untuk menjalankan pertanian mereka dengan lebih menguntungkan secara kolektif disebut sebagai "pemberdayaan petani." Program dan kegiatan meliputi instruksi dan pelatihan, metode dan fasilitas untuk menjual barang pertanian, jaminan dan konsolidasi lahan pertanian, kemudahan akses ke ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi, serta pembentukan lembaga petani. Payne (dikutip dalam Adi, 2008:30) menyatakan bahwa tujuan utama pemberdayaan adalah untuk memberi klien kemampuan untuk membuat keputusan mereka sendiri, termasuk mengurangi dampak hambatan sosial yang dapat menghalangi mereka mengambil tindakan. Memberi mereka lebih banyak keterampilan dan keyakinan diri untuk menggunakan kekuatan yang sudah mereka miliki, termasuk kemampuan untuk mentransfer kekuatan dari lingkungan mereka, mencapai tujuan ini. Shardlow (dalam Adi, 2008:31) mengklaim bahwa upaya untuk mengendalikan kehidupan seseorang dan membentuknya sesuai keinginannya sendiri pada dasarnya adalah apa yang dimaksud dengan pemberdayaan.

Pemberdayaan petani harus berfokus pada peningkatan kapasitas mereka sendiri dan memberi mereka lebih banyak akses terhadap peluang dan sumber daya

untuk meluncurkan bisnis menguntungkan yang memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Agenda operasional yang penting dalam industri pertanian adalah penyuluhan dan pendidikan. Pertumbuhan pertanian belum mampu memenuhi harapan masyarakat Indonesia karena beberapa masalah yang terkadang muncul. Di antara masalah tersebut adalah kurangnya pengetahuan dan keahlian di masyarakat, sehingga diperlukan keterlibatan pemerintah dalam hal ini melalui pembentukan organisasi petani. Masyarakat pertanian pada akhirnya akan memperoleh lebih banyak kekuatan dari kelompok tani, sehingga meningkatkan efektivitas dan efisiensi hasil panennya. Mendorong kelompok tani untuk menggunakan pembinaan guna meningkatkan hasil panen hanyalah cara untuk menyelesaikan sesuatu tepat waktu. Sastraadmadja (dalam Mandasari, 2014:24) menyatakan bahwa karena petani tersebar di seluruh wilayah pedesaan, maka diyakini bahwa dengan terbentuknya organisasi petani, mereka akan mampu saling bertukar pikiran dan mencari solusi atas berbagai permasalahan yang berkaitan dengan usaha tani mereka. Pembentukan kelompok tani ini dilatarbelakangi oleh keinginan untuk meningkatkan keterlibatan petani dan keluarganya dalam pembangunan dengan menggunakan teknik kelompok untuk membangun dan memperluas kemampuan mereka sebagai pelaku pembangunan pertanian. BPLPP mengklaim bahwa kelompok tani merupakan salah satu bentuk organisasi petani yang berfungsi sebagai media penyuluhan dengan penekanan lebih besar pada peningkatan usaha pertanian (Mandasari, 2014:27).

Petani dapat memperoleh informasi dalam kelompok dan mengembangkan keahlian melalui kelompok tani, yang akan memungkinkan mereka untuk

meningkatkan hasil panen padi secara signifikan. Kelompok tani merupakan cara yang baik untuk mendidik petani, yang sangat penting bagi masyarakat petani, tentang cara membuat rencana ke depan dan bekerja sama karena mereka dapat menangani semua pekerjaan dan masalah pertanian sekaligus. Fungsi yang dilakukan oleh kelompok tani adalah sebagai berikut: Pertama, kelas pembelajaran, atau kelompok tani sebagai tempat untuk memberikan instruksi dan pelatihan guna membantu anggotanya dalam meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan sikap mereka agar menjadi petani yang matang dan mandiri yang dapat menggunakan teknologi dan sumber informasi untuk meningkatkan hasil panen, pendapatan, dan standar hidup. Ketiga, seluruh operasi pertanian atau unit produksi masing-masing anggota merupakan unit bisnis terpisah yang dapat dikembangkan untuk mencapai ukuran bisnis yang terjangkau dengan menjunjung tinggi kuantitas, kualitas, dan keberlanjutan. Kedua, organisasi petani berfungsi sebagai platform untuk meningkatkan kolaborasi antar petani dan dengan entitas eksternal, sehingga membuat usaha pertanian lebih produktif, tangguh terhadap kesulitan, dan mampu bertahan terhadap bahaya.

Dari permasalahan diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Strategi Pemerintah Desa dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Pemerintah Kota Batu”**.

1.2 Rumusan Masalah

Pernyataan masalah untuk penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa niat Pemerintah Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, untuk memperkuat kelompok tani?

2. Bagaimana upaya pemerintah desa di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu dalam membantu dan menghambat pemberdayaan kelompok tani?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan proses pencapaian pemberdayaan kelompok tani di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.
2. Untuk mengetahui unsur-unsur yang menjadi acuan pemerintah desa serta faktor-faktor yang mendorong dan menghambat pemberdayaan kelompok tani di Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - 1) Memiliki kemampuan untuk belajar lebih banyak dari pengamatan langsung dan memahami penggunaan mata kuliah ilmiah yang dipelajari di luar perguruan tinggi.
 - 2) Sebagai sumber informasi bagi para akademisi di kemudian hari tentang mata kuliah terkait.
2. Manfaat praktis
 - 1) Sebagai bahan pemikiran dan informasi ilmiah untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat.
 - 2) Pemerintah Desa Tulungrejo dapat memanfaatkan hasil penelitian ini untuk memperkuat kelembagaan petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan. Masyarakat Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Adisasmito. 2013. *Pembangunan Perdesaan*. Makasar: Graha Ilmu.
- Anwas. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat Di Era Globalisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Ayuningtiyas. 2014. *Keefektivan Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Petani*. Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Fakultas Ilmu Pendidikan. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bhimo. 2012. *Pemberdayaan Masyarakat*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Moleong. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosadakarya
- Mandasari. 2014. *Hubungan Peran Kelompok Tani Dengan Produktifitas Usaha TaniPadi*. Fakultas Sains dan Teknologi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidaytullah.
- Maschab. 2013. *Politik Pemerintahan Desa di Indonesia*. Fisipol UGM: Polgov.
- Rahayu, Ending Sri. 2010. *Pemberdayaan Masyarakat Petani*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret, Fakultas Pertanian.
- Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solekhan. 2014. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*. Malang: Setara Press.
- Sofa, Haida. 2015. *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Sumodiningrat. 2016. *Membangun Indonesia Dari Desa*. Jakarta: Media Pressindo.
- Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suhariyanto. 2017. *Pengaruh Kegiatan Pertanian Terhadap Tingkat Kesejahteraan*. Jakarta: Editor
- Tati, Nurmala. Dkk. 2012. *Pengantar Ilmu Pertanian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Widjaja. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.